



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021-2026**

(Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)



Dirumuskan dan disusun :

Oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

KECAMATAN PONOROGO

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN PONOROGO**

Jalan Sultan Agung No.19, Telp. (0352) 486086, Kode Pos (63419)
Website: <https://kota.ponorogo.go.id> Email : kec.ponorogo.01@gmail.com

P O N O R O G O

KEPUTUSAN CAMAT PONOROGO
NOMOR : 188.4/ 10 /405.30.17/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021-2026

CAMAT PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ponorogo Tahun 2021-2026 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ponorogo berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;
- c. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo (RPJPD) Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ponorogo;
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Ponorogo yang berisi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Ponorogo yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Naskah Rencana Strategis Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.
pada tanggal 23 September 2021

CAMAT PONOROGO,



SISWOYO, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19650712 198903 1 015



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ponorogo ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Selanjutnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo yaitu “ **MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAKWA) ”**.



Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini kami sampaikan terima kasih. Semoga apa-apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 September 2021

**CAMAT PONOROGO**

SISWOYO, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650712 198903 1 015



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi :	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
1. Sumber Daya Manusia	22
2. Sarana Prasarana	23
3. Sumber Daya Lainnya	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
Tabel 2.1	33
Tabel 2.2	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi :	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal	37
2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi :	43
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	43



	Tabel 4.1	44
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
	Tabel 5.1	47
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
	Tabel 6.1	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	93
	Tabel 7.1	95
BAB VIII	PENUTUP	96



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021	33
TABEL 2.2	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	35
TABEL 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo	44
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	47
TABEL 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo	52
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	95



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD	3
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo	20
GAMBAR 2.2	Bagan Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo	21
GAMBAR 2.3	Peta Kecamatan Ponorogo	26



DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Camat Ponorogo Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.4/10/405.30.17/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan Penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.



Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

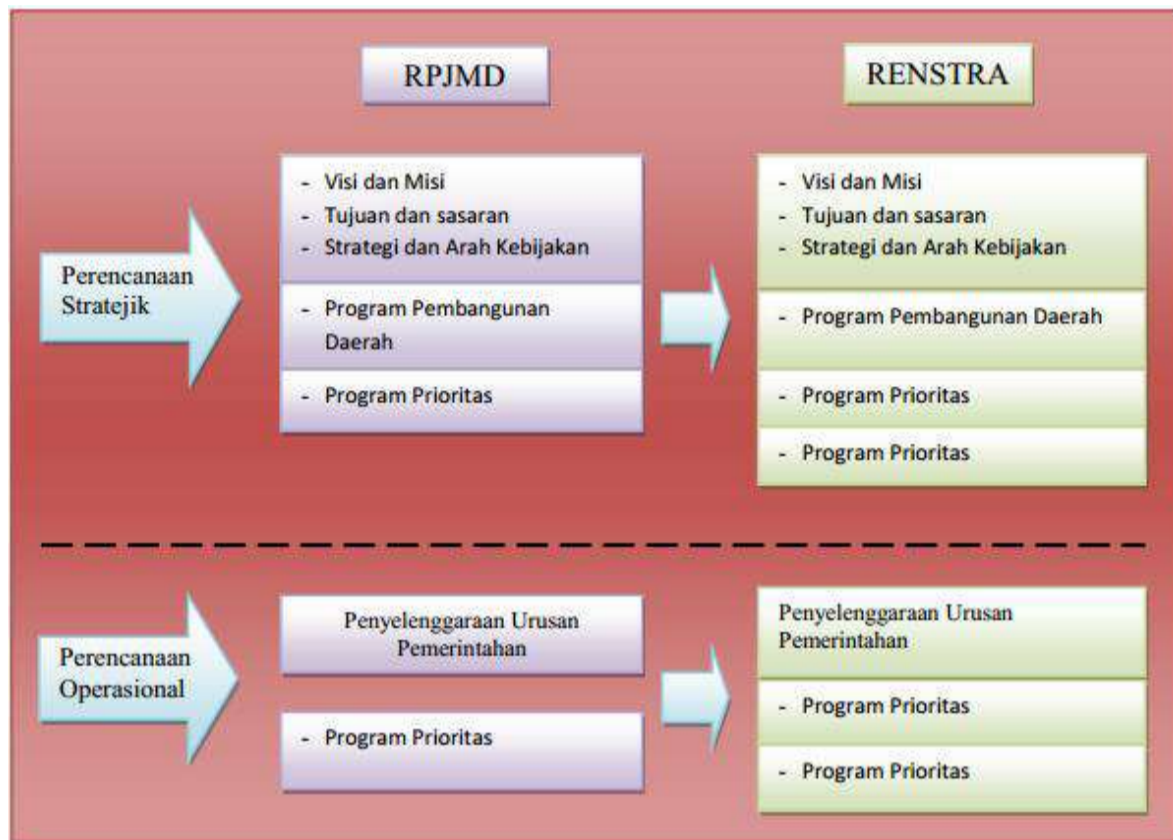
- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Ponorogo Kabupaten Ponorogo selaku Kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD

Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis



- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202- Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);



27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
34. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021;
35. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
37. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama;



38. Keputusan Camat Ponorogo Kabupaten Ponorogo Nomor : 188.4/10/405.30.17/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.



- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis Kecamatan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi :

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah,
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.1

Tabel 2.2



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, Berisi :

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah,
Tabel 4.1

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Ponorogo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.



Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

1. Tugas

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;



- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.



- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengeloaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.



c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi kelurahan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
 - f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;



- c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
- f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;



- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



g. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Susunan Organisasi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Seksi Pelayanan Umum
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Selain Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Ponorogo diatas, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 229 disebutkan bahwa Kelurahan dipimpin seorang Kepala Kelurahan yang disebut lurah



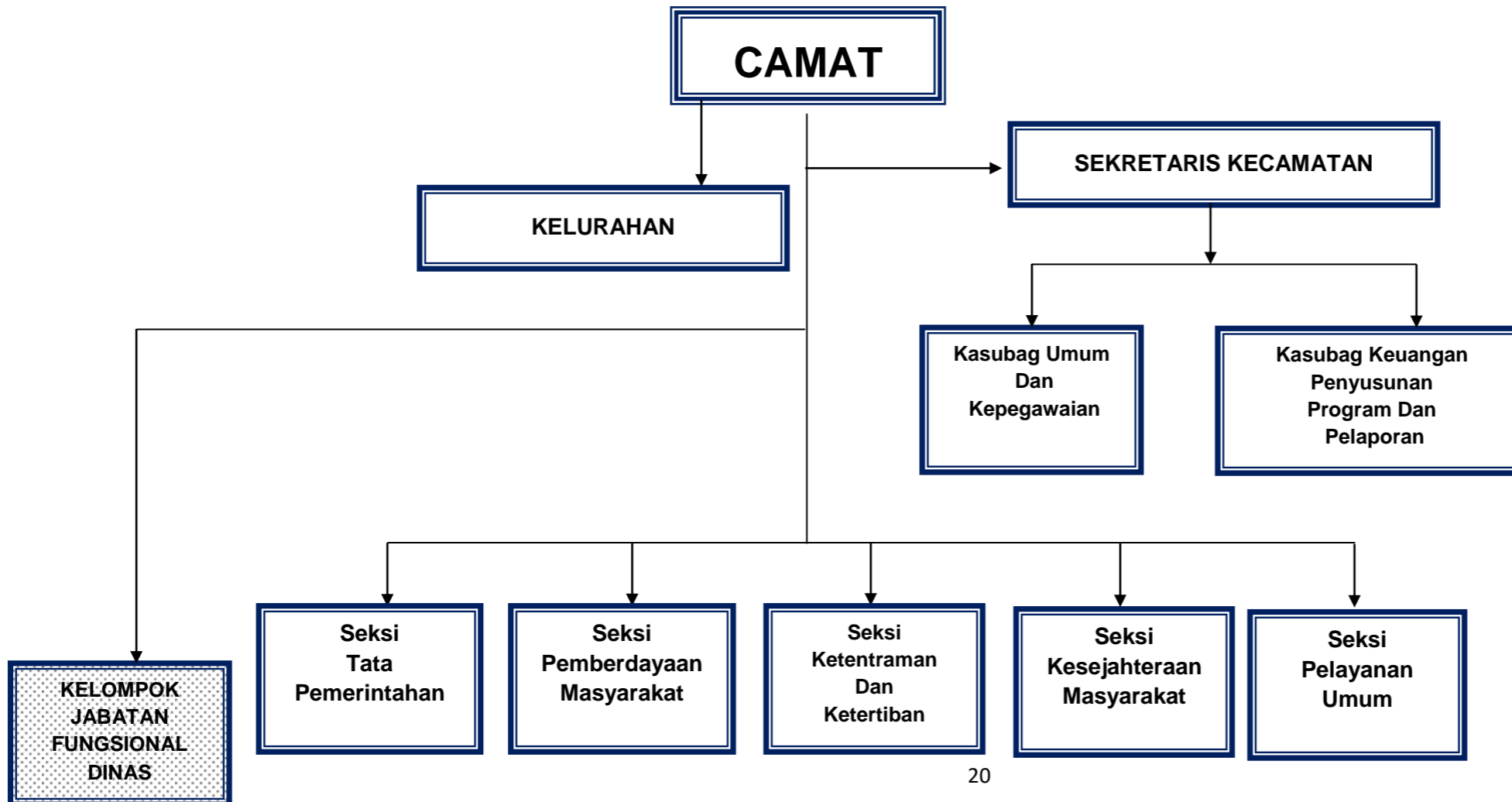
selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Sedangkan Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, pemeliharaan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan setempat.

d. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- 1) Lurah
- 2) Sekretaris Kelurahan
- 3) Perangkat Kelurahan yang terdiri dari :
 - a) Seksi Pemerintahan Umum
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c) Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

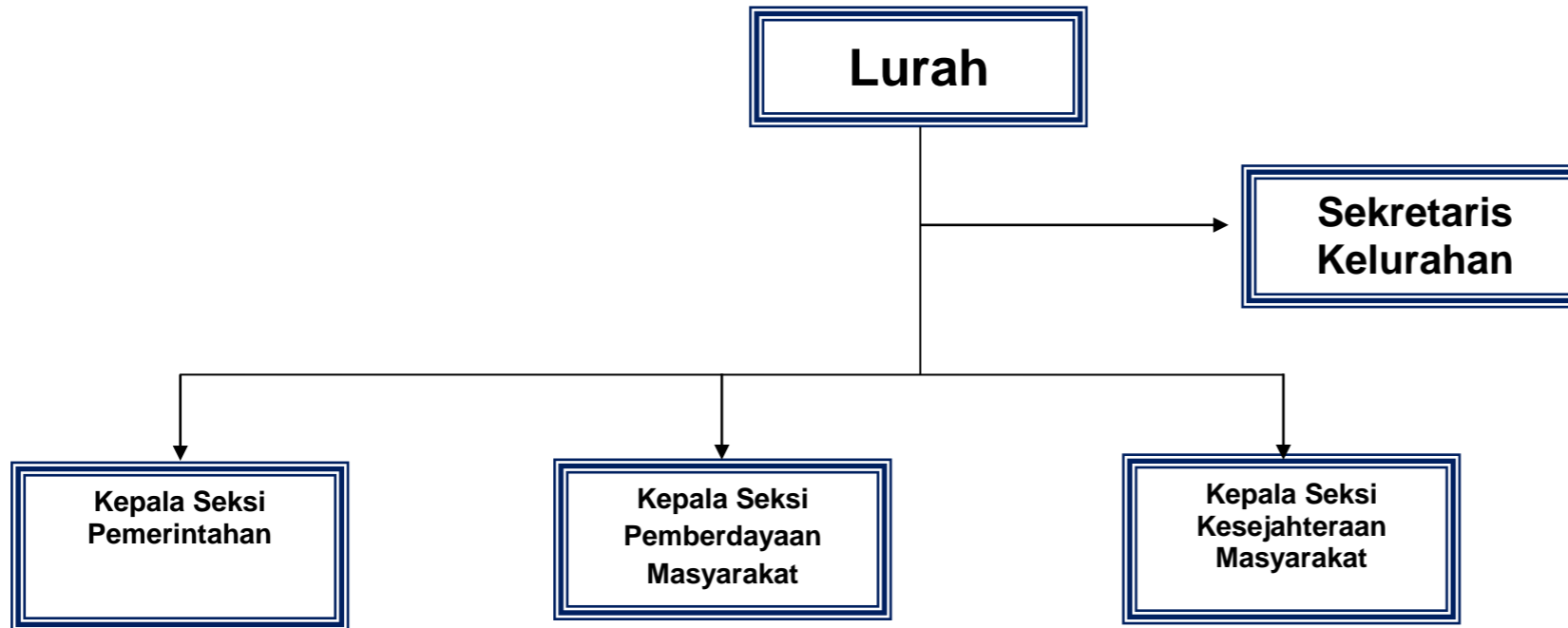


Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo





Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 14 (Empat belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

➤ Eselon III a	:	1	orang
➤ Eselon III b	:	1	orang
➤ Eselon IV a	:	4	orang
➤ Eselon IV b	:	1	orang
➤ Staf	:	7	orang +
JUMLAH	:	14	orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

➤ S-3	:	-	orang
➤ S-2	:	5	orang
➤ S-1	:	7	orang
➤ Sarjana Muda	:	1	orang
➤ SLTA	:	1	orang
➤ SLTP	:	-	orang +
JUMLAH	:	14	orang

Berdasarkan Golongan :

➤ Golongan IV	:	2	orang
➤ Golongan III	:	11	orang
➤ Golongan II	:	1	orang
➤ Golongan I	:	-	orang +
JUMLAH	:	14	orang

Berdasarkan Umur / Usia :

➤ Usia 30 – 35 tahun	:	1	orang
➤ Usia 36 - 40 tahun	:	7	orang
➤ Usia 41 - 45 tahun	:	2	orang
➤ Usia 46 - 50 tahun	:	2	orang
➤ Usia 51 - 55 tahun	:	2	orang
➤ Usia > 56 tahun	:	-	orang +
JUMLAH	:	14	orang



Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Ponorogo untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki /terdapat kekurangan staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KONDISI			KET
				B	KB	RB	
1	Tanah/Bangunan		1	1	-	-	
2	Station Wagon	Panther	1	1	-	-	
3	Sepeda Motor	Honda Win	1	1	-	-	
4	Sepeda Motor	Honda Revo	1	1	-	-	
5	Air Conditioner	Panasonic	4	4	-	-	
6	Air Conditioner	LG	1	1	-	-	
7	Mesin Ketik	Longewagen	2	2	-	-	
8	Lemari Besi	Brother	10	10	-	-	
9	Filling Cabinet Besi	Brother	5	5	-	-	
10	Papan Pengumuman	Bahan Kayu	1	1	-	-	
11	Meja Kerja Kayu	Lokal	21	21	-	-	
12	Kursi Kayu	Lokal	25	25	-	-	
13	Kursi Rapat	Lokal	80	80	-	-	
14	Meja Rapat	Lokal	17	17	-	-	



15	Kursi Tamu	Lokal	8	8	-	-	
16	Bangku Tunggu	Lokal	2	2	-	-	
17	Kipas Angin	Maspion	3	3	-	-	
18	Televisi LED	LG	2	2	-	-	
19	Microphone Wireless Set		1	1	-	-	
20	Laptop	HP	1	-	-	1	Rusak
21	Laptop	Acer	1	1	-	-	
22	Laptop	Compaq	1	-	-	1	Rusak
23	Printer	Epson	3	3	-	-	
24	Printer	Canon	3	3	-	-	
25	Personal Computer		4	4	-	-	
26	Proyektor + Attachment	Ben-Q	1	1	-	-	
27	Camera Digital	Canon	1	-	-	1	Rusak
28	Kursi Putar		6	6	-	-	
29	Printer Scanner	Epson	1	1	-	-	
30	Software Cont Offline Computer		1	1	-	-	
31	Pesawat Telepon	Tens	2	2	-	-	
32	Rak Kayu / Besi	Lokal	1	1	-	-	
33	Jam Elektronik		3	3	-	-	
34	Personal Computer	Lenovo	1	1	-	-	
35	Mobil Rush	Rush	1	1	-	-	
36	Laptop	Asus	1	2	-	-	
37	Laptop	Dell	1	2	-	-	

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Ponorogo sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan



yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sumber Daya Lainnya

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun hubungan kerja kecamatan dengan desa bersifat pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi. Dalam membina penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan, Kecamatan memiliki kewenangan antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan di Kelurahan; memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan; melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan; dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

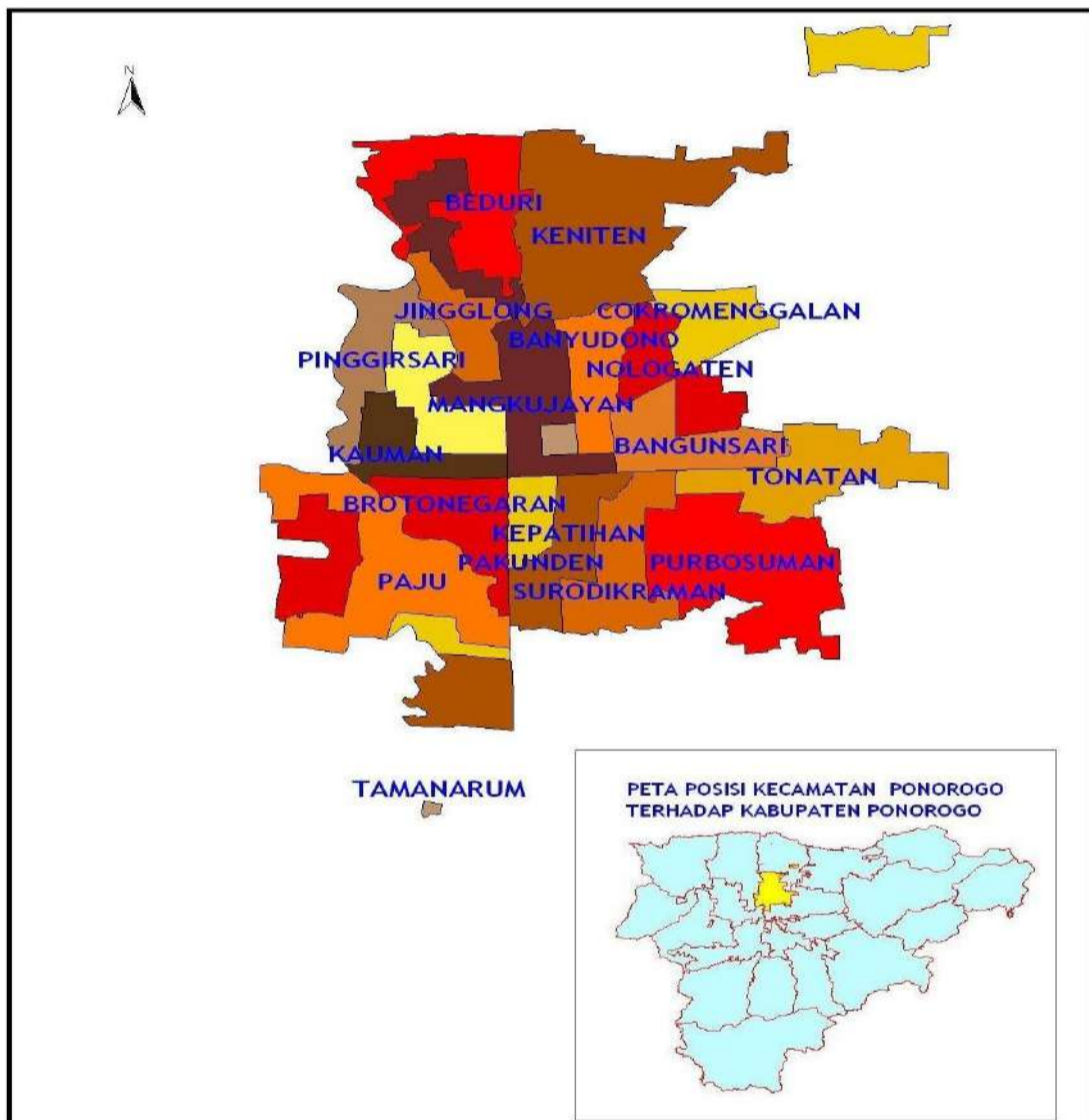
Kecamatan Ponorogo merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Ponorogo terletak di ketinggian 109 meter sampai dengan 172 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 22,31 Km² yang secara administratif terbagi dalam 19 Kelurahan, 44 Lingkungan, 405 Rukun Tetangga (RT) dan 119 Rukun Warga (RW). Adapun Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Paju
2. Brotonegaran
3. Pakunden
4. Kepatihan
5. Surodikraman
6. Purbosuman
7. Tonatan
8. Bangunsari
9. Tamanarum
10. Kauman
11. Tambakbayan
12. Pinggirsari
13. Mangkujayan
14. Banyudono
15. Nologaten
16. Cokromenggalan
17. Keniten
18. Jingglong
19. Beduri

Batas fisik wilayah Kecamatan Ponorogo :

Batas fisik : Sebelah utara : Kecamatan Babadan
Sebelah timur : Kecamatan Jenangan
Sebelah selatan : Kabupaten Siman
Sebelah barat : Kecamatan Kauman

Gambar 2.3
PETA KECAMATAN PONOROGO



Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Ponorogo sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sejumlah 78.525 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 38.906 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 39.619 Jiwa.

Potensi Wilayah Kecamatan Ponorogo

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Kelurahan di Kecamatan Ponorogo. Komoditi



pertanian yang menonjol di Kecamatan Ponorogo adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua Kelurahan dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Ponorogo serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Kecamatan Ponorogo merupakan pusat pengembangan perkotaan Ponorogo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten dan mengembangkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama kabupaten dan melayani beberapa kecamatan disekitarnya dan sebagai pusat kawasan permukiman perkotaan.

Selain itu juga terdapat pembangkit energi listrik yang disalurkan ke wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Mendukung jaringan jalan baik Nasional dan Provinsi serta rencana reaktivasi kereta api. Potensi lainnya antara lain merupakan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (industri pengolahan produk pertanian) dan kawasan peruntukan pariwisata budaya antara lain kirab pusaka, pagelaran wayang khusus, pagelaran seni Reog

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Ponorogo antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis dan menjadi pusat Kabupaten Ponorogo.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah).
3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif



4. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
5. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Ponorogo, antara lain Pasar Songolangit Ponorogo dan Aloon-Aloon Ponorogo.
6. Terdapat beberapa sektor pariwisata, pusat perbelanjaan dan sarana prasarana olahraga.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangattergantungan pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuanyang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi danberdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangankelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkatketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber dayaaparatur di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sangattlahpenting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang inimenuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untukdapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakinmeningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak padatuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ponorogo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja



Pelayanan di Kecamatan Ponorogo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Prosentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
- Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan SKPD
- Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja disusun tepat waktu
- Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun
- Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan
- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
- Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian
- Jumlah Penerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi
- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli
- Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian
- Jumlah ATK yang tersedia
- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia
- Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti
- Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara
- Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola
- Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon
- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki
- Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara
- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara
- Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindaklanjuti
- Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI
- Jumlah kelompok seni budaya aktif
- Jumlah pokja sehat yang difasilitasi
- Prosentase Dokumen perencanaan Pelayanan Publik yang disusun
- Jumlah SPP dan SOP yang diterbitkan
- Prosentase Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum yang terpelihara
- Jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan
- Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli
- Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat



- Jumlah Kelurahan yang dimonitoring evaluasi pengelolaan anggaran kelurahan
- Prosentase koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan
- Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan
- Jumlah Kelurahan yang menyusun Program Kerja secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan
- Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Jumlah penanganan potensi gangguan trantibum
- Jumlah kelurahan yang melaksanakan Musrenbang
- Jumlah Kelompok PKK Aktif

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Ponorogo memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat kelurahan, lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
6. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di kelurahan;
7. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
8. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Ponorogo
9. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat kelurahan secara rutin;
10. Pelaksanaan apel KORPRI setiap tanggal 17 dilanjutkan dengan diadakan evaluasi kegiatan satu bulan melibatkan personil kecamatan, kelurahan dan dinas secepat;



11. Mengadakan Rapat koordinasi Lurah, Sekretaris kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan se Kecamatan Ponorogo sesuai jadwal;
12. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
13. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
14. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Ponorogo;
15. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat kelurahan;
16. Memberikan sosialisasi bagi perangkat kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
17. Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang Kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Ponorogo;



8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Ponorogo periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021 menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel Tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016 - 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan			100	80	81	-	-	-	75,81	66,60	-	-	-	94,763	82,222	-	-	-
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi			100	-	-	82	83	84	-	-	77,10	77,10	89,60	-	-	94,024	92,892	106,67
3	Persentase Hasil Koordinasi yang di tindak lanjuti dalam bidang : a.Pemerintahan b.Pemberdayaan Masyarakat c.Ketentraman dan Ketertiban umum d.Kesejahteraan Masyarakat			100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada tahun 2016-2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagaimana Tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016 - 2020

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Tidak langsung	10.161.704.000	8.742.996.000	9.113.342.000	10.826.950.000	9.046.235.000	10.161.704.000	8.758.591.485	9.105.721.800	10.664.163.242	8.929.511.580	100	100	99	98	98	416.790.800	381.114.351
Belanja Langsung	5.168.815.174	5.517.002.812	5.377.009.949	12.334.866.636	10.561.181.772	5.135.205.550	5.234.189.050	5.316.556.800	12.186.882.588	10.473.020.193	99	94	98	98	99	1.433.210.292	1.410.335.408



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Ponorogo.
3. Perubahan pola pendekatan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dengan pendekatan "*Money Follow Program*".

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Ponorogo untuk meningkatkan kinerja.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

a. Faktor Kekuatan (*Strenghts*)

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ponorogo.
2. Pola kerja kecamatan Ponorogo yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam bentuk SOP yang diterbitkan oleh Camat atau Instansi terkait yang berkepentingan.
3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Ponorogo sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.
4. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada masyarakat yang kurang optimal.



5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Ponorogo untuk meningkatkan kinerja.
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
5. Pengelolaan Anggaran Kelurahan secara langsung memberikan dampak positif dalam peran Kantor Kecamatan Ponorogo untuk meningkatkan kapabilitas aparatur Kelurahan melalui fasilitasi dan monitoring penggunaan Anggaran Kelurahan

b. Faktor Ancaman (Threat)

1. Keterbatasan pendanaan tingkat Pemerintah Daerah, sehingga hasil Musrenbang tidak seluruhnya dapat terakomodasi dalam KUA PPAS maupun dalam RKA SKPD/RAPBD.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Ponorogo.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021–2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

**”Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT ”
(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)**

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras.

Elok : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo.

Bergas : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.

Amanah : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Takwa : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

Misi Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo merujuk pada misi keempat Kepala Daerah yaitu:

Misi 4 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif”.

Misi Kecamatan Ponorogo tersebut di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan, yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Kecamatan Ponorogo harus konsisten dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu



Bupati sesuai kewenangan yang dimilikinya, terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kemudahan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo tidak ada kewenangan dalam memberikan rekomendasi untuk semua izin usaha Sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya menyatakan bahwa usaha eksplorasi dan eksploitasi harus memperhatikan faktor pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup, yang dalam hal ini Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo tidak mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi untuk semua izin usaha, karena hal tersebut menjadi Kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal ini perlu diperhatikan karena setiap izin usaha khususnya penambangan berpotensi akan menimbulkan dampak lingkungan ke masyarakat. Seringkali adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat tetapi Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo akan tetap memantau izin usaha yang ada melalui Kelurahan masing masing.

Faktor pendorong dalam mendukung pelayanan dalam pemanfaatan Tata ruang dan Lingkungan antara lain:

- a. Telah memiliki Perda RTRW;
- b. Keterbukaan masyarakat dan budaya gotong royong



c. Masyarakat masih relatif mudah untuk diingatkan jika terjadi pelanggaran

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan dalam mendukung pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan perundang-undangan
- b. Keterbatasan SDM

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ponorogo antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima.
2. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada masyarakat yang kurang optimal.
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
4. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam meyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.



Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan-pendekatan yang diharapkan berdampak positif terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ponorogo, sebagai berikut :

1. Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021 adalah :

“ Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan “.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.1 berikut ini :



TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PONOROGO

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85	86	86	87	87



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima
- c. Pemantapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
- d. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- e. Peningkatan Koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM



maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja
3. Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel;
4. Pemantapan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Kelurahan;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan;
7. Meningkatkan koordinasi dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 5.1 berikut ini :



TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Dengan indikator tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1.1.1 Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima	1.1.1.1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dengan pelayanan prima
		1.1.2 Peningkatan Profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima	1.1.2.1 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja
			1.1.2.2 Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel
		1.1.3 Pemantapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan	1.1.3.1 Pemantapan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan



Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026

		peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal	perundang-undangan yang berlaku
		1.1.4 Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	1.1.4.1 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Kelurahan
			1.1.4.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan
		1.1.5 Peningkatan Koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum	1.1.5.1 Meningkatkan koordinasi dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang administrasi ditetapkan melalui Program :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Implementasi program tersebut dalam kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Evaluasi Kelurahan
- D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- c. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 6.1 berikut ini :



Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Taun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	KECAMATAN				11.569.589.572		12.443.242.797		12.788.737.944		12.871.305.844		13.026.012.276		13.111.412.267		13.111.412.267			
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi															Kecamatan Ponorogo	Kecamatan Ponorogo
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	11.352.889.572	100	12.226.542.797	100	12.572.037.944	100	12.654.605.844	100	12.809.312.276	100	12.894.712.267	100	12.894.712.267			
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan SKPD yang disusun	500.000	7 Dok	2.500.000	2 Dok	2.500.000	2 Dok	2.500.000	2 Dok	2.500.000	2 Dok	2.500.000	2 Dok	2.500.000			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	10.962.190.000	100	11.810.028.650	100	12.150.512.600	100	12.220.797.073	100	12.374.369.616	100	12.447.186.646	100	12.447.186.646			



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.934.090.000	130 Orang	11.779.928.650	130 Orang	12.118.012.600	130 Orang	12.188.297.073	130 Orang	12.341.869.616	130 Orang	12.414.686.646	130 Orang	12.414.686.646		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	27.600.000	4 Orang	27.600.000	4 Orang	30.000.000	4 Orang	30.000.000	4 Orang	30.000.000	4 Orang	30.000.000	4 Orang	30.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000	4 Dok	2.500.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	-	-
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	152.799.000	100	172.799.000	100	172.799.000	100	172.799.000	100	172.799.000	100	172.799.000	100	172.799.000	-	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	23.500.000	2 Unit	23.500.000	2 Unit	23.500.000	2 Unit	23.500.000	2 Unit	23.500.000	2 Unit	23.500.000	2 Unit	23.500.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian - Jumlah ATK yang tersedia	100.099.000	15 orang 1 Paket	115.099.000	15 orang 1 Paket	115.099.000	15 orang 1 Paket	115.099.000	15 orang 1 Paket	115.099.000	15 orang 1 Paket	115.099.000	15 orang 1 Paket	115.099.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	14.200.000	1 Paket	14.200.000	1 Paket	14.200.000	1 Paket	14.200.000	1 Paket	14.200.000	1 Paket	14.200.000	1 Paket	14.200.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsolidasi yang diikuti	15.000.000	3 Rapat	20.000.000	3 Rapat	20.000.000	3 Rapat	20.000.000	3 Rapat	20.000.000	3 Rapat	20.000.000	3 Rapat	20.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	45.000.572	100	46.815.147	100	46.826.344	100	46.826.345	100	47.960.234	100	47.960.234	100	47.960.234	-	-
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	5.000.000	1.350 Surat	5.000.000	1.350 Surat	5.000.000	1.350 Surat	5.000.000	1.350 Surat	5.000.000	1.350 Surat	5.000.000	1.350 Surat	5.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran listrik air & telepon	35.000.572	12 Lap	36.815.146,99	12 Lap	36.826.343,59	12 Lap	36.826.344,57	12 Lap	37.960.233,51	12 Lap	37.960.233,80	12 Lap	37.960.233,80		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki	5.000.000	2 Item	5.000.000	2 Item	5.000.000	2 Item	5.000.000	2 Item	5.000.000	2 Item	5.000.000	2 Item	5.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	186.900.000	100	186.900.000	100	191.900.000	100	204.183.426	100	204.183.426	100	216.766.387	100	216.766.387	-	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	34.500.000	2 Unit	34.500.000	2 Unit	34.500.000	2 Unit	34.500.000	2 Unit	34.500.000	2 Unit	34.500.000	2 Unit	34.500.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	152.400.000	1 Gedung	152.400.000	1 Gedung	157.400.000	1 Gedung	169.683.426	1 Gedung	169.683.426	1 Gedung	182.266.387	1 Gedung	182.266.387		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	155.000.000	80	155.000.000	80	155.000.000	80	155.000.000	80	155.000.000	80	155.000.000	80	155.000.000	-	-
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	113.900.000	100	113.900.000	100	113.900.000	100	113.900.000	100	113.900.000	100	113.900.000	100	113.900.000	-	-
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI Jumlah kelompok seni budaya aktif Jumlah pokja sehat yang difasilitasi	113.900.000	- 3 Event - 19 Kel - 19 Kel	113.900.000	- 3 Event - 19 Kel - 19 Kel	113.900.000	- 3 Event - 19 Kel - 19 Kel	113.900.000	- 3 Event - 19 Kel - 19 Kel	113.900.000	- 3 Event - 19 Kel - 19 Kel	113.900.000	- 3 Event - 19 Kel - 19 Kel	113.900.000		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Dokumen pelaksanaan Pelayanan publik yang disusun	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	-	-
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah SPP dan SOP yang diterbitkan	1.000.000	1 SPP / 28 SOP	1.000.000	1 SPP / 28 SOP	1.000.000	1 SPP / 28 SOP	1.000.000	1 SPP / 28 SOP	1.000.000	1 SPP / 28 SOP	1.000.000	1 SPP / 28 SOP	1.000.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum yang terpelihara	40.100.000	100	40.100.000	100	40.100.000	100	40.100.000	100	40.100.000	100	40.100.000	100	40.100.000	-	-



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	-Jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis -Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli	40.100.000	3 Orang 1 Paket	40.100.000	3 Orang 1 Paket	40.100.000	3 Orang 1 Paket	40.100.000	3 Orang 1 Paket	40.100.000	3 Orang 1 Paket	40.100.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000		-
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000		-
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi dan dimonitoring pelaksanaan anggaran kelurahan	2.500.000	19 kelurahan	2.500.000	19 kelurahan	2.500.000	19 kelurahan	2.500.000	19 kelurahan	2.500.000	19 kelurahan	2.500.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase dokumen perencanaan Kelurahan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	45.200.000	100	45.200.000	100	45.200.000	100	45.200.000	100	45.200.000	100	45.200.000		-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase dokumen perencanaan Kelurahan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	45.200.000	100	45.200.000	100	45.200.000	100	45.200.000	100	45.200.000	100	45.200.000		-
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan	36.000.000	12 Fasilitasi	36.000.000	12 Fasilitasi	36.000.000	12 Fasilitasi	36.000.000	12 Fasilitasi	36.000.000	12 Fasilitasi	36.000.000		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang menyusun Program Kerja secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	9.200.000	19 Kelurahan	9.200.000	19 Kelurahan	9.200.000	19 Kelurahan	9.200.000	19 Kelurahan	9.200.000	19 Kelurahan	9.200.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	-	-
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase hasil hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	-	-
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan kasus gangguan Trantibum	3.000.000	1 Kasus	3.000.000	1 Kasus	3.000.000	1 Kasus	3.000.000	1 Kasus	3.000.000	1 Kasus	3.000.000	1 Kasus	3.000.000		
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	5.000.000	19 Kelurahan	5.000.000	19 Kelurahan	5.000.000	19 Kelurahan	5.000.000	19 Kelurahan	5.000.000	19 Kelurahan	5.000.000	19 Kelurahan	5.000.000		
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kelompok PKK Aktif	6.000.000	19 Kelompok	6.000.000	19 Kelompok	6.000.000	19 Kelompok	6.000.000	19 Kelompok	6.000.000	19 Kelompok	6.000.000	19 Kelompok	6.000.000		
PAJU					583.950.000		587.150.000		590.150.000		590.150.000		591.250.000		591.250.000		591.250.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	141.950.000	100	145.150.000	100	148.150.000	100	148.150.000	100	149.250.000	100	149.250.000	100	149.250.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	10.200.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	10.200.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas beserta atributnya	4.500.000	10 orang	4.500.000	10 orang	4.500.000	10 orang	4.500.000	10 orang	4.500.000	10 orang	4.500.000	10 orang	4.500.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	54.500.000	100	56.500.000	100	56.500.000	100	56.500.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

				terpenuhi														
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	2.500.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian	39.000.000	1 tahun 10 orang	39.000.000	1 tahun 10 orang	39.000.000	1 tahun 10 orang	39.000.000	1 tahun 10 orang	39.000.000	1 tahun 10 orang	39.000.000	1 tahun 10 orang	39.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2.500.000	500 lbr	2.500.000	500 lbr	2.500.000	500 lbr	2.500.000	500 lbr	2.500.000	500 lbr	2.500.000	500 lbr	2.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	7.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah belanja modal sarana pendukung pelayanan kantor	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	20.500.000	100	20.500.000	100	20.500.000	100	20.500.000	100	20.500.000	100	20.500.000	100	20.500.000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	3.500.000	1200 surat	3.500.000	1200 surat	3.500.000	1200 surat	3.500.000	1200 surat	3.500.000	1200 surat	3.500.000	1200 surat	3.500.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.250.000	100	37.250.000	100	37.250.000	100	37.250.000	100	37.250.000	100	37.250.000	100	37.250.000	



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di perbaiki														
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	pemeliharaan aset gedung dan bangunan kantor	37.250.000	1 titik	37.250.000	1 titik	37.250.000	1 titik	37.250.000	1 titik	37.250.000	1 titik	37.250.000	1 titik	37.250.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	42.000.000	4 orang	42.000.000	4 orang	42.000.000	4 orang	42.000.000	4 orang	42.000.000	4 orang	42.000.000	4 orang	42.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah akses pembangunan jalan setapak dan saluran pembuangan	250.000.000	3 titik	250.000.000	3 titik	250.000.000	3 titik	250.000.000	3 titik	250.000.000	3 titik	250.000.000	3 titik	250.000.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	meningkatkan jumlah koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat	150.000.000	5 keg	150.000.000	5 keg	150.000.000	5 keg	150.000.000	5 keg	150.000.000	5 keg	150.000.000	5 keg	150.000.000	
BROTO NEGARAN					537.164.000		541.464.000		541.464.000		541.464.000		545.564.000		545.564.000		545.564.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	71.264.000	100	75.564.000	100	75.564.000	100	75.564.000	100	79.664.000	100	79.664.000	100	79.664.000	



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	9.600.000	100	11.400.000	100	11.400.000	100	11.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	9.600.000	12 bln	11.400.000	12 bln	11.400.000	12 bln	11.400.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	44.574.000	100	47.074.000	100	47.074.000	100	47.074.000	100	47.574.000	100	47.574.000	100	47.574.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan yang dibeli	750.000	1 lap	750.000	1 lap	750.000	1 lap	750.000	1 lap	750.000	1 lap	750.000	1 lap	750.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	2.850.000	1 Paket	2.850.000	1 Paket	2.850.000	1 Paket	2.850.000	1 Paket	2.850.000	1 Paket	2.850.000	1 Paket	2.850.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian	31.974.000	1 tahun 10 orang	31.974.000	1 tahun 10 orang	31.974.000	1 tahun 10 orang	31.974.000	1 tahun 10 orang	31.974.000	1 tahun 10 orang	31.974.000	1 tahun 10 orang	31.974.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2.000.000	500 lbr	2.000.000	500 lbr	2.000.000	500 lbr	2.000.000	500 lbr	2.000.000	500 lbr	2.000.000	500 lbr	2.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	7.000.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	14.840.000	100	14.840.000	100	14.840.000	100	14.840.000	100	14.840.000	100	14.840.000	100	14.840.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	12.840.000	1 tahun	12.840.000	1 tahun	12.840.000	1 tahun	12.840.000	1 tahun	12.840.000	1 tahun	12.840.000	1 tahun	12.840.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	2.250.000	100	2.250.000	100	2.250.000	100	2.250.000	100	2.250.000	100	2.250.000	100	2.250.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	2.250.000	2 lap	2.250.000	2 lap	2.250.000	2 lap	2.250.000	2 lap	2.250.000	2 lap	2.250.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	31.500.000	4 orang	31.500.000	4 orang	31.500.000	4 orang	31.500.000	4 orang	31.500.000	4 orang	31.500.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	434.400.000	100	434.400.000	100	434.400.000	100	434.400.000	100	434.400.000	100	434.400.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	434.400.000	100	434.400.000	100	434.400.000	100	434.400.000	100	434.400.000	100	434.400.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah akses pembangunan jalan setapak dan saluran pembuangan	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	meningkatnya jumlah koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat	234.400.000	5 keg	234.400.000	5 keg	234.400.000	5 keg	234.400.000	5 keg	234.400.000	5 keg	234.400.000		
PAKUN DEN					504.022.600		506.522.600		509.522.600		509.522.600		510.622.600		510.622.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	69.122.600	100	71.622.600	100	74.622.600	100	74.622.600	100	75.722.600	100	75.722.600		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	11.400.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	11.400.000	5 orang	11.400.000	5 orang	14.400.000	5 orang	14.400.000	5 orang	15.000.000	5 orang	15.000.000	5 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas beserta atributnya	2.700.000	10 orang	2.700.000	10 orang	2.700.000	10 orang	2.700.000	10 orang	2.700.000	10 orang	2.700.000	10 orang	2.700.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	43.282.600	100	45.782.600	100	45.782.600	100	45.782.600	100	46.282.600	100	46.282.600	100	46.282.600		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman dan alat tulis kantor yang tersedia	34.815.800	1 tahun 10 orang	34.815.800	1 tahun 10 orang	34.815.800	1 tahun 10 orang	34.815.800	1 tahun 10 orang	34.815.800	1 tahun 10 orang	34.815.800	1 tahun 10 orang	34.815.800		
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1.466.800	500 lbr	1.466.800	500 lbr	1.466.800	500 lbr	1.466.800	500 lbr	1.466.800	500 lbr	1.466.800	500 lbr	1.466.800		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	7.000.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	9.240.000	100	9.240.000	100	9.240.000	100	9.240.000	100	9.240.000	100	9.240.000	100	9.240.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang tersedia	1.500.000	1 tahun	1.500.000	1 tahun	1.500.000	1 tahun	1.500.000	1 tahun	1.500.000	1 tahun	1.500.000	1 tahun	1.500.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan pembayaran telepon air dan listrik	7.740.000	12 bln	7.740.000	12 bln	7.740.000	12 bln	7.740.000	12 bln	7.740.000	12 bln	7.740.000	12 bln	7.740.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tercukupinya kebutuhan pemeliharaan perlatan kantor	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000	100	27.300.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	27.300.000	3 orang	27.300.000	3 orang	27.300.000	3 orang	27.300.000	3 orang	27.300.000	3 orang	27.300.000	3 orang	27.300.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000	100	407.600.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah akses pembangunan drainase dan paving	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	meningkatnya pelayanan posyandu dan pembinaan ketrampilan masyarakat	157.600.000	6 keg	157.600.000	6 keg	157.600.000	6 keg	157.600.000	6 keg	157.600.000	6 keg	157.600.000	6 keg	157.600.000		
KEPATIHAN					516.600.000		518.900.000		518.900.000		518.900.000		523.000.000		523.000.000		523.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	105.230.000	100	107.530.000	100	107.530.000	100	107.530.000	100	111.630.000	100	111.630.000	100	111.630.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	9.600.000	100	11.400.000	100	11.400.000	100	11.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	9.600.000	12 bln	11.400.000	12 bln	11.400.000	12 bln	11.400.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas beserta atributnya	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	56.330.000	100	56.830.000	100	56.830.000	100	56.830.000	100	57.330.000	100	57.330.000	100	57.330.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Beli	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli	3.500.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.500.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia Jumlah Penerima Belanja Makan dan Minum Harian	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	9.000.000	4 rapat	9.500.000	4 rapat	9.500.000	4 rapat	9.500.000	4 rapat	10.000.000	4 rapat	10.000.000	4 rapat	10.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Belanja Modal Yang Dibeli	8.000.000	2 buah	8.000.000	2 buah	8.000.000	2 buah	8.000.000	2 buah	8.000.000	2 buah	8.000.000	2 buah	8.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Belanja Modal Sarana Pendukung Pelayanan Kantor	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk Yang Dikelola	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Listrik dan Telepon Speddy	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diperbaiki	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	100	38.500.000	
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	38.500.000	4 orang	38.500.000	4 orang	38.500.000	4 orang	38.500.000	4 orang	38.500.000	4 orang	38.500.000	4 orang	38.500.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	100	372.870.000	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	164.670.000	3 titik	164.670.000	3 titik	164.670.000	3 titik	164.670.000	3 titik	164.670.000	3 titik	164.670.000	3 titik	164.670.000	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Koordinasi Dalam Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	208.200.000	5 keg	208.200.000	5 keg	208.200.000	5 keg	208.200.000	5 keg	208.200.000	5 keg	208.200.000	5 keg	208.200.000	
SUROD IKRAM AN					621.850.000		623.650.000		626.650.000		626.650.000		627.250.000		627.250.000		627.250.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	141.750.000	100	143.550.000	100	146.550.000	100	146.550.000	100	147.150.000	100	147.150.000	100	147.150.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	9.600.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	9.600.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas beserta atributnya	6.500.000	13 orang	6.500.000	13 orang	6.500.000	13 orang	6.500.000	13 orang	6.500.000	13 orang	6.500.000	13 orang	6.500.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	66.700.000	100	66.700.000	100	66.700.000	100	66.700.000	100	66.700.000	100	66.700.000	100	66.700.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor	3.000.000	4 kali	3.000.000	4 kali	3.000.000	4 kali	3.000.000	4 kali	3.000.000	4 kali	3.000.000	4 kali	3.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian	43.000.000	1 tahun 13 orang	43.000.000	1 tahun 13 orang	43.000.000	1 tahun 13 orang	43.000.000	1 tahun 13 orang	43.000.000	1 tahun 13 orang	43.000.000	1 tahun 13 orang	43.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah pembelian surat kabar	2.100.000	12 lap	2.100.000	12 lap	2.100.000	12 lap	2.100.000	12 lap	2.100.000	12 lap	2.100.000	12 lap	2.100.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	15.600.000	1 kali	15.600.000	1 kali	15.600.000	1 kali	15.600.000	1 kali	15.600.000	1 kali	15.600.000	1 kali	15.600.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembelian kendaraan dinas	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	18.950.000	100	18.950.000	100	18.950.000	100	18.950.000	100	18.950.000	100	18.950.000	100	18.950.000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2.750.000	250 surat	2.750.000	250 surat	2.750.000	250 surat	2.750.000	250 surat	2.750.000	250 surat	2.750.000	250 surat	2.750.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	16.200.000	12 lap	16.200.000	12 lap	16.200.000	12 lap	16.200.000	12 lap	16.200.000	12 lap	16.200.000	12 lap	16.200.000	



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000	100	59.500.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	59.500.000	5 orang	59.500.000	5 orang	59.500.000	5 orang	59.500.000	5 orang	59.500.000	5 orang	59.500.000	5 orang	59.500.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000	100	420.600.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	presentase sarana dan prasarana yang dibangun	197.600.000	100%	197.600.000	100%	197.600.000	100%	197.600.000	100%	197.600.000	100%	197.600.000	100%	197.600.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat dikelurahan	223.000.000	100%	223.000.000	100%	223.000.000	100%	223.000.000	100%	223.000.000	100%	223.000.000	100%	223.000.000		
PURBO SUMAN					528.380.000		531.380.000		534.380.000		534.380.000		535.480.000		535.480.000		535.480.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	86.030.000	100	89.030.000	100	92.030.000	100	92.030.000	100	93.130.000	100	93.130.000	100	93.130.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	11.400.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	11.400.000	5 orang	11.400.000	5 orang	14.400.000	5 orang	14.400.000	5 orang	15.000.000	5 orang	15.000.000	5 orang	15.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	46.330.000	100	49.330.000	100	49.330.000	100	49.330.000	100	49.830.000	100	49.830.000	100	49.830.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor	3.000.000	1 keg	3.000.000	1 keg	3.000.000	1 keg	3.000.000	1 keg	3.000.000	1 keg	3.000.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli	2.500.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian	36.830.000	1 tahun	30.830.000	1 tahun	30.830.000	1 tahun	30.830.000	1 tahun	30.830.000	1 tahun	30.830.000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	4.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti			9.500.000		9.500.000		9.500.000		10.000.000		10.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja modal sarana pendukung oelayanan kantor	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	29.000.000	4 orang	29.000.000	4 orang	29.000.000	4 orang	29.000.000	4 orang	29.000.000	4 orang	29.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	413.350.000	100	413.350.000	100	413.350.000	100	413.350.000	100	413.350.000	100	413.350.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	413.350.000	100	413.350.000	100	413.350.000	100	413.350.000	100	413.350.000	100	413.350.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah akses pembangunan jalan setapak dan saluran pembuangan	202.550.000	5 titik	202.550.000	5 titik	202.550.000	5 titik	202.550.000	5 titik	202.550.000	5 titik	202.550.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	meningkatnya jumlah koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat	210.800.000	8 titik	210.800.000	8 titik	210.800.000	8 titik	210.800.000	8 titik	210.800.000	8 titik	210.800.000		
TONATAN					522.860.500		525.160.500		528.160.500		528.160.500		529.260.500		529.260.500		529.260.500
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	104.230.000	100	106.530.000	100	109.530.000	100	109.530.000	100	110.630.000	100	110.630.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	9.600.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	9.600.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas beserta atributnya	3.000.000	10 orang	3.000.000	10 orang	3.000.000	10 orang	3.000.000	10 orang	3.000.000	10 orang	3.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	55.330.000	100	55.830.000	100	55.830.000	100	55.830.000	100	56.330.000	100	56.330.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Beli	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli	2.500.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia Jumlah Penerima Belanja Makan dan Minum Harian	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000	1 Paket 10 orang	36.830.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	9.000.000	4 rapat	9.500.000	4 rapat	9.500.000	4 rapat	10.000.000	4 rapat	10.000.000	4 rapat	10.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Belanja Modal Yang Dibeli	8.000.000	2 buah	8.000.000	2 buah	8.000.000	2 buah	8.000.000	2 buah	8.000.000	2 buah	8.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Belanja Modal Sarana Pendukung Pelayanan Kantor	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000	100	18.300.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk Yang Dikelola	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Listrik dan Telepon Speddy	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diperbaiki	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000	4 unit	3.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500	100	387.130.500		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	177.930.500	3 titik	177.930.500	3 titik	177.930.500	3 titik	177.930.500	3 titik	177.930.500	3 titik	177.930.500	3 titik	177.930.500		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Koordinasi Dalam Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	209.200.000	8 keg	209.200.000	8 keg	209.200.000	8 keg	209.200.000	8 keg	209.200.000	8 keg	209.200.000	8 keg	209.200.000		
BANGU NSARI					534.730.000		536.730.000		539.730.000		539.730.000		540.830.000		540.830.000		540.830.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	61.730.000	100	63.730.000	100	66.730.000	100	66.730.000	100	67.830.000	100	67.830.000	100	67.830.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	11.400.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	11.400.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas beserta atributnya	1.000.000	10 orang	1.000.000	10 orang	1.000.000	10 orang	1.000.000	10 orang	1.000.000	10 orang	1.000.000	10 orang	1.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	32.400.000	100	34.400.000	100	34.400.000	100	34.400.000	100	34.900.000	100	34.900.000	100	34.900.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Beli	1.100.000	1 Paket	1.100.000	1 Paket	1.100.000	1 Paket	1.100.000	1 Paket	1.100.000	1 Paket	1.100.000	1 Paket	1.100.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli	1.300.000	1 Paket	1.300.000	1 Paket	1.300.000	1 Paket	1.300.000	1 Paket	1.300.000	1 Paket	1.300.000	1 Paket	1.300.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia Jumlah Penerima Belanja Makan dan Minum Harian	21.000.000	1 Paket 10 orang	21.000.000	1 Paket 10 orang	21.000.000	1 Paket 10 orang	21.000.000	1 Paket 10 orang	21.000.000	1 Paket 10 orang	21.000.000	1 Paket 10 orang	21.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	7.500.000	4 rapat	9.500.000	4 rapat	9.500.000	4 rapat	9.500.000	4 rapat	10.000.000	4 rapat	10.000.000	4 rapat	10.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	5.200.000	100	5.200.000	100	5.200.000	100	5.200.000	100	5.200.000	100	5.200.000	100	5.200.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Belanja Modal Yang Dibeli	200.000	2 buah	200.000	2 buah	200.000	2 buah	200.000	2 buah	200.000	2 buah	200.000	2 buah	200.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Belanja Modal Sarana Pendukung Pelayanan Kantor	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	11.730.000	100	11.730.000	100	11.730.000	100	11.730.000	100	11.730.000	100	11.730.000	100	11.730.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk Yang Dikelola	1.000.000	100 surat	1.000.000	100 surat	1.000.000	100 surat	1.000.000	100 surat	1.000.000	100 surat	1.000.000	100 surat	1.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Listrik dan Telepon Speddy	9.480.000	12 bln	9.480.000	12 bln	9.480.000	12 bln	9.480.000	12 bln	9.480.000	12 bln	9.480.000	12 bln	9.480.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diperbaiki	1.250.000	1 tahun	1.250.000	1 tahun	1.250.000	1 tahun	1.250.000	1 tahun	1.250.000	1 tahun	1.250.000	1 tahun	1.250.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	39.000.000	4 orang	39.000.000	4 orang	39.000.000	4 orang	39.000.000	4 orang	39.000.000	4 orang	39.000.000	4 orang	39.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah akses Pembangunan Saluran Pembuangan	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat	234.000.000	5 keg	234.000.000	5 keg	234.000.000	5 keg	234.000.000	5 keg	234.000.000	5 keg	234.000.000	5 keg	234.000.000		
TAMAN ARUM					454.264.600		457.064.600		460.064.600		460.064.600		461.164.600		461.164.600		461.164.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	56.840.000	100	59.640.000	100	62.640.000	100	62.640.000	100	63.740.000	100	63.740.000	100	63.740.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	9.600.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	9.600.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	37.520.000	100	38.520.000	100	38.520.000	100	38.520.000	100	39.020.000	100	39.020.000	100	39.020.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan yang dibeli	1.000.000	10 unit	1.000.000	10 unit	1.000.000	10 unit	1.000.000	10 unit	1.000.000	10 unit	1.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian	25.220.000	1 tahun	25.220.000	1 tahun	25.220.000	1 tahun	25.220.000	1 tahun	25.220.000	1 tahun	25.220.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	penyediaan barang cetakan dan pengandaan yang tersedia	1.000.000	3500 lbr	1.000.000	3500 lbr	1.000.000	3500 lbr	1.000.000	3500 lbr	1.000.000	3500 lbr	1.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah pembelian surat kabar	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	8.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	9.720.000	100	9.720.000	100	9.720.000	100	9.720.000	100	9.720.000	100	9.720.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	720.000	450 surat	720.000	450 surat	720.000	450 surat	720.000	450 surat	720.000	450 surat	720.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	8.000.000	12 lap	8.000.000	12 lap	8.000.000	12 lap	8.000.000	12 lap	8.000.000	12 lap	8.000.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diperbaiki	1.000.000	5 unit	1.000.000	5 unit	1.000.000	5 unit	1.000.000	5 unit	1.000.000	5 unit	1.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	30.000.000	4 orang	30.000.000	4 orang	30.000.000	4 orang	30.000.000	4 orang	30.000.000	4 orang	30.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600	100	367.424.600		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah akses pembangunan sarana dan prasarana	211.734.600	5 titik	211.734.600	5 titik	211.734.600	5 titik	211.734.600	5 titik	211.734.600	5 titik	211.734.600	5 titik	211.734.600		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya jumlah koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat	155.690.000	8 keg	155.690.000	8 keg	155.690.000	8 keg	155.690.000	8 keg	155.690.000	8 keg	155.690.000	8 keg	155.690.000		
KAUMAN					606.776.200		609.076.200		612.076.200		612.076.200		613.176.200		613.176.200		613.176.200		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	112.526.200	100	114.826.200	100	117.826.200	100	117.826.200	100	118.926.200	100	118.926.200	100	118.926.200		
			Administrasi Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	9.600.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	9.600.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000	100	2.700.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas beserta atributnya	2.700.000	9 orang	2.700.000	9 orang	2.700.000	9 orang	2.700.000	9 orang	2.700.000	9 orang	2.700.000	9 orang	2.700.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	54.926.200	100	55.426.200	100	55.426.200	100	55.426.200	100	55.926.200	100	55.926.200	100	55.926.200		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	4.500.000	1 keg	4.500.000	1 keg	4.500.000	1 keg	4.500.000	1 keg	4.500.000	1 keg	4.500.000	1 keg	4.500.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman	36.926.200	1 tahun 1 tahun	36.926.200	1 tahun 1 tahun	36.926.200	1 tahun 1 tahun	36.926.200	1 tahun 1 tahun	36.926.200	1 tahun 1 tahun	36.926.200	1 tahun 1 tahun	36.926.200		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			harian															
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4.500.000	9000 lbr	4.500.000	9000 lbr	4.500.000	9000 lbr	4.500.000	9000 lbr	4.500.000	9000 lbr	4.500.000	9000 lbr	4.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	9.000.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah belanja modal sarana pendukung pelayanan kantor Jumlah belanja modal yang dibeli	25.000.000	2 unit 2 buah	25.000.000	2 unit 2 buah	25.000.000	2 unit 2 buah	25.000.000	2 unit 2 buah	25.000.000	2 unit 2 buah	25.000.000	2 unit 2 buah	25.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	20.300.000	100	20.300.000	100	20.300.000	100	20.300.000	100	20.300.000	100	20.300.000	100	20.300.000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diperbaiki	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	100	19.500.000	
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	19.500.000	2 orang	19.500.000	2 orang	19.500.000	2 orang	19.500.000	2 orang	19.500.000	2 orang	19.500.000	2 orang	19.500.000	



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000	100	474.750.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	pembuatan gapuro dan taman	199.750.000	4 titik	199.750.000	4 titik	199.750.000	4 titik	199.750.000	4 titik	199.750.000	4 titik	199.750.000	4 titik	199.750.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya jumlah koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat	275.000.000	3 keg	275.000.000	3 keg	275.000.000	3 keg	275.000.000	3 keg	275.000.000	3 keg	275.000.000	3 keg	275.000.000		
TAMBA	KBAYA				504.932.800		506.992.800		509.992.800		509.992.800		511.092.800		511.092.800		511.092.800		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	130.330.300	100	132.390.300	100	135.390.300	100	135.390.300	100	136.490.300	100	136.490.300	100	136.490.300		
			Administrasi Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	11.400.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	11.400.000	5 orang	11.400.000	5 orang	14.400.000	5 orang	14.400.000	5 orang	15.000.000	5 orang	15.000.000	5 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	3.000.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai	3.000.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	81.243.200	100	82.803.200	100	82.803.200	100	82.803.200	100	83.303.200	100	83.303.200	100	83.303.200		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	28.823.200	4 unit	28.823.200	4 unit	28.823.200	4 unit	28.823.200	4 unit	28.823.200	4 unit	28.823.200	4 unit	28.823.200		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman	42.480.000	1 tahun	42.480.000	1 tahun	42.480.000	1 tahun	42.480.000	1 tahun	42.480.000	1 tahun	42.480.000	1 tahun	42.480.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			harian															
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	7.940.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	16.900.000	100	16.900.000	100	16.900.000	100	16.900.000	100	16.900.000	100	16.900.000	100	16.900.000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1.500.000	150 surat	1.500.000	150 surat	1.500.000	150 surat	1.500.000	150 surat	1.500.000	150 surat	1.500.000	150 surat	1.500.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	10.900.000	12 bln	10.900.000	12 bln	10.900.000	12 bln	10.900.000	12 bln	10.900.000	12 bln	10.900.000	12 bln	10.900.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diperbaiki	4.500.000	4 unit	4.500.000	4 unit	4.500.000	4 unit	4.500.000	4 unit	4.500.000	4 unit	4.500.000	4 unit	4.500.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.787.100	100	17.787.100	100	17.787.100	100	17.787.100	100	17.787.100	100	17.787.100	100	17.787.100	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana Prasarana Kualitas Kantor	17.787.100	100%	17.787.100	100%	17.787.100	100%	17.787.100	100%	17.787.100	100%	17.787.100	100%	17.787.100	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	34.000.000	3 orang	34.000.000	3 orang	34.000.000	3 orang	34.000.000	3 orang	34.000.000	3 orang	34.000.000	3 orang	34.000.000	



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500	100	340.602.500		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah akses pembangunan sarana dan prasarana	241.599.000	100%	241.599.000	100%	241.599.000	100%	241.599.000	100%	241.599.000	100%	241.599.000	100%	241.599.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya jumlah koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat	99.003.500	4 keg	99.003.500	4 keg	99.003.500	4 keg	99.003.500	4 keg	99.003.500	4 keg	99.003.500	4 keg	99.003.500		
PINGGI RSARI					466.354.000		467.654.000		472.654.000		472.654.000		473.754.000		473.754.000		473.754.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	62.954.000	100	64.254.000	100	69.254.000	100	69.254.000	100	70.354.000	100	70.354.000	100	70.354.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	9.600.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	9.600.000	3 orang	11.400.000	3 orang	14.400.000	3 orang	14.400.000	3 orang	15.000.000	3 orang	15.000.000	3 orang	15.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	46.202.000	100	45.702.000	100	47.702.000	100	47.702.000	100	48.202.000	100	48.202.000	100	48.202.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	7.000.000	4 unit	5.500.000	4 unit	7.500.000	4 unit	7.500.000	4 unit	7.500.000	4 unit	7.500.000	4 unit	7.500.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian	27.704.500	1 tahun	27.704.500	1 tahun	27.704.500	1 tahun	27.704.500	1 tahun	27.704.500	1 tahun	27.704.500	1 tahun	27.704.500		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penerima makan dan minum tamu	2.997.500	109 orang	2.997.500	109 orang	2.997.500	109 orang	2.997.500	109 orang	2.997.500	109 orang	2.997.500	109 orang	2.997.500		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	8.500.000	1 kali	9.500.000	1 kali	9.500.000	1 kali	9.500.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7.152.000	100	7.152.000	100	7.152.000	100	7.152.000	100	7.152.000	100	7.152.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1.300.000	100 surat	1.300.000	100 surat	1.300.000	100 surat	1.300.000	100 surat	1.300.000	100 surat	1.300.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	5.852.000	12 laporan	5.852.000	12 laporan	5.852.000	12 laporan	5.852.000	12 laporan	5.852.000	12 laporan	5.852.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	29.400.000	100	29.400.000	100	29.400.000	100	29.400.000	100	29.400.000	100	29.400.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	29.400.000	100	29.400.000	100	29.400.000	100	29.400.000	100	29.400.000	100	29.400.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	29.400.000	3 orang	29.400.000	3 orang	29.400.000	3 orang	29.400.000	3 orang	29.400.000	3 orang	29.400.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	374.000.000	100	374.000.000	100	374.000.000	100	374.000.000	100	374.000.000	100	374.000.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	374.000.000	100	374.000.000	100	374.000.000	100	374.000.000	100	374.000.000	100	374.000.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	presentase sarana dan prasarana yang dibangun	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah penerima honor RT RW jumlah penerima mamin posyandu jumlah penerima mamin rapat PKK jumlah penerima mamin RT RW jumlah penerima mamin tamu presentase pelaksanaan pelatihan karang taruna presentase pelaksanaan pelatihan PKK	174.000.000	10 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 persen 100 persen	174.000.000	10 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 persen 100 persen	174.000.000	10 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 persen 100 persen	174.000.000	10 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 persen 100 persen	174.000.000	10 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 persen 100 persen	174.000.000		
MANGK UJAYA N					607.060.000		608.060.000		611.060.000		611.060.000		612.160.000		612.160.000		612.160.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	81.900.000	100	82.900.000	100	85.900.000	100	85.900.000	100	87.000.000	100	87.000.000	100	87.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	11.400.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	11.400.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai	3.000.000	10 orang	3.000.000	10 orang	3.000.000	10 orang	3.000.000	10 orang	3.000.000	10 orang	3.000.000	10 orang	3.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	49.500.000	100	50.500.000	100	50.500.000	100	50.500.000	100	51.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan yang dibeli		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli	2.500.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia	33.000.000	1 tahun 10 orang	33.000.000	1 tahun 10 orang	33.000.000	1 tahun 10 orang	33.000.000	1 tahun 10 orang	33.000.000	1 tahun 10 orang	33.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2.000.000	5000 lbr	2.000.000	5000 lbr	2.000.000	5000 lbr	2.000.000	5000 lbr	2.000.000	5000 lbr	2.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	9.000.000	4 orang	9.500.000	4 orang	9.500.000	4 orang	9.500.000	4 orang	10.000.000	4 orang	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2.000.000	200 surat	2.000.000	200 surat	2.000.000	200 surat	2.000.000	200 surat	2.000.000	200 surat	2.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	12.500.000	12 bln	12.500.000	12 bln	12.500.000	12 bln	12.500.000	12 bln	12.500.000	12 bln	12.500.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diperbaiki	3.500.000	5 unit	3.500.000	5 unit	3.500.000	5 unit	3.500.000	5 unit	3.500.000	5 unit	3.500.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	49.000.000	6 orang	49.000.000	6 orang	49.000.000	6 orang	49.000.000	6 orang	49.000.000	6 orang	49.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	476.160.000	100	476.160.000	100	476.160.000	100	476.160.000	100	476.160.000	100	476.160.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	476.160.000	100	476.160.000	100	476.160.000	100	476.160.000	100	476.160.000	100	476.160.000	100	476.160.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Akses Pembangunan Jalan Setapak dan Saluran Pembuangan	136.960.000	4 titik	136.960.000	4 titik	136.960.000	4 titik	136.960.000	4 titik	136.960.000	4 titik	136.960.000	4 titik	136.960.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya jumlah koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat	339.200.000	8 keg	339.200.000	8 keg	339.200.000	8 keg	339.200.000	8 keg	339.200.000	8 keg	339.200.000	8 keg	339.200.000		
BANYU DONO					533.051.500		133.651.500		137.651.500		137.651.500		138.751.500		138.751.500		138.751.500		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	104.651.500	100	78.050.000	100	82.050.000	100	82.050.000	100	83.150.000	100	83.150.000	100	83.150.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	9.600.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	9.600.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	3.150.000	100	3.150.000	100	3.150.000	100	3.150.000	100	3.150.000	100	3.150.000	100	3.150.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai	3.150.000	9 orang	3.150.000	9 orang	3.150.000	9 orang	3.150.000	9 orang	3.150.000	9 orang	3.150.000	9 orang	3.150.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	47.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian	32.000.000	1 tahun 10 orang	32.000.000	1 tahun 10 orang	32.000.000	1 tahun 10 orang	32.000.000	1 tahun 10 orang	32.000.000	1 tahun 10 orang	32.000.000	1 tahun 10 orang	32.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	6000 lbr	3.000.000	6000 lbr	3.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	9.000.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	16.000.000	100	16.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Belanja Modal Yang Dibeli	8.000.000	2 buah	9.000.000	2 buah	9.000.000	2 buah	9.000.000	2 buah	9.000.000	2 buah	9.000.000	2 buah	9.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Belanja Modal Sarana Pendukung Pelayanan Kantor	8.000.000	1 unit	7.000.000	1 unit	8.000.000	1 unit	8.000.000	1 unit	8.000.000	1 unit	8.000.000	1 unit	8.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	12.300.000	100	12.300.000	100	12.300.000	100	12.300.000	100	12.300.000	100	12.300.000	100	12.300.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000	1200 surat	3.300.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	9.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.601.500	100	16.601.500	100	16.601.500	100	16.601.500	100	16.601.500	100	16.601.500	100	16.601.500
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	3.000.000	6 unit	3.000.000	6 unit	3.000.000	6 unit	3.000.000	6 unit	3.000.000	6 unit	3.000.000	6 unit	3.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang di perbaiki	13.601.500	1 tahun	13.601.500	1 tahun	13.601.500	1 tahun	13.601.500	1 tahun	13.601.500	1 tahun	13.601.500	1 tahun	13.601.500
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	42.000.000	3 orang	42.000.000	3 orang	42.000.000	3 orang	42.000.000	3 orang	42.000.000	3 orang	42.000.000	3 orang	42.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000	100	386.400.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah akses pemnbangunan jalan setapak dan saluran	225.000.000	5 titik	225.000.000	5 titik	225.000.000	5 titik	225.000.000	5 titik	225.000.000	5 titik	225.000.000	5 titik	225.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	meningkatkan jumlah koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat	161.400.000	8 keg	161.400.000	8 keg	161.400.000	8 keg	161.400.000	8 keg	161.400.000	8 keg	161.400.000	8 keg	161.400.000		
NOLOG ATEN					531.400.000		532.900.000		535.900.000		535.900.000		537.000.000		537.000.000		537.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	67.000.000	100	68.500.000	100	71.500.000	100	71.500.000	100	72.600.000	100	72.600.000	100	72.600.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	11.400.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	11.400.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	3.000.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	keseragaman pakaian dinas di kelurahan	3.000.000	10 orang	3.500.000	10 orang	3.500.000	10 orang	3.500.000	10 orang	3.500.000	10 orang	3.500.000	10 orang	3.500.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	39.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.500.000	100	40.500.000	100	40.500.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor kelurahan	29.000.000	1 tahun 10 orang	29.000.000	1 tahun 10 orang	29.000.000	1 tahun 10 orang	29.000.000	1 tahun 10 orang	29.000.000	1 tahun 10 orang	29.000.000	1 tahun 10 orang	29.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kelancaran administrasi kantor untuk kearsipan	1.500.000	1 paket	1.500.000	1 paket	1.500.000	1 paket	1.500.000	1 paket	1.500.000	1 paket	1.500.000	1 paket	1.500.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi yang diikuti	8.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	13.600.000	100	13.600.000	100	13.600.000	100	13.600.000	100	13.600.000	100	13.600.000	100	13.600.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran administrasi di kelurahan	1.600.000	1 paket	1.600.000	1 paket	1.600.000	1 paket	1.600.000	1 paket	1.600.000	1 paket	1.600.000	1 paket	1.600.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi dan penerangan di kantor	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	12.000.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	terpeliharanya fasilitas umum yang lebih baik di kelurahan	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000	100	424.400.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di kelurahan	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000	4 titik	250.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kemampuan sumber daya manusia yang lebih mumpuni dan kesejahteraan yang lebih bagus	174.400.000	3 keg	174.400.000	3 keg	174.400.000	3 keg	174.400.000	3 keg	174.400.000	3 keg	174.400.000	3 keg	174.400.000		
COKRO MENGK ALAN					522.685.000		523.085.000		526.085.000		526.085.000		527.185.000		527.185.000		527.185.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	56.885.000	100	57.285.000	100	60.285.000	100	60.285.000	100	61.385.000	100	61.385.000	100	61.385.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	12.000.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	12.000.000	6 orang	11.400.000	6 orang	14.400.000	6 orang	14.400.000	6 orang	15.000.000	6 orang	15.000.000	6 orang	15.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	35.885.000	100	36.885.000	100	36.885.000	100	36.885.000	100	37.385.000	100	37.385.000	100	37.385.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia Jumlah penerima makan dan minum	27.385.000	1 tahun 10 orang	27.385.000	1 tahun 10 orang	27.385.000	1 tahun 10 orang	27.385.000	1 tahun 10 orang	27.385.000	1 tahun 10 orang	27.385.000	1 tahun 10 orang	27.385.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	8.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000	4 keg	10.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik dan telepon speedy	9.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.000.000	12 bln	9.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000	100	39.000.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah penerima jasa kebersihan kantor dan teknis kegiatan	39.000.000	14 bln	39.000.000	14 bln	39.000.000	14 bln	39.000.000	14 bln	39.000.000	14 bln	39.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	426.800.000	100	426.800.000	100	426.800.000	100	426.800.000	100	426.800.000	100	426.800.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	426.800.000	100	426.800.000	100	426.800.000	100	426.800.000	100	426.800.000	100	426.800.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prosentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat dikelurahan	266.800.000	1 lap	266.800.000	1 lap	266.800.000	1 lap	266.800.000	1 lap	266.800.000	1 lap	266.800.000		
KENITEN					607.458.800		611.658.800		614.658.800		614.658.800		615.758.800		615.758.800		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	109.758.800	100	113.958.800	100	116.958.800	100	116.958.800	100	118.058.800	100	118.058.800		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	9.600.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	9.600.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	89.158.800	100	92.058.800	100	92.058.800	100	92.058.800	100	92.058.800	100	92.058.800	100	92.058.800		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang dibeli	2.000.000	10 unit	2.000.000	10 unit	2.000.000	10 unit	2.000.000	10 unit	2.000.000	10 unit	2.000.000	10 unit	2.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan kantor yang akan dibeli	31.500.000	2 unit	31.500.000	2 unit	31.500.000	2 unit	31.500.000	2 unit	31.500.000	2 unit	31.500.000	2 unit	31.500.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang disediakan jumlah penerima mamin harian pegawai jumlah penerima mamin rapat	47.058.800	1 tahun 1 tahun 1 tahun	47.058.800	1 tahun 1 tahun 1 tahun	47.058.800	1 tahun 1 tahun 1 tahun	47.058.800	1 tahun 1 tahun 1 tahun	47.058.800	1 tahun 1 tahun 1 tahun	47.058.800	1 tahun 1 tahun 1 tahun	47.058.800		
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	7.600.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000	4 keg	9.500.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	11.000.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	1.500.000	150 buah	1.000.000	150 buah	1.000.000	150 buah	1.000.000	150 buah	1.000.000	150 buah	1.000.000	150 buah	1.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan listrik, telepon, dan internet	9.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000	100	49.000.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	penerima jasa kebersihan, penjaga malam, modin, tenaga IT penyediaan alat kebersihan	49.000.000	5 orang 1 tahun	49.000.000	5 orang 1 tahun	49.000.000	5 orang 1 tahun	49.000.000	5 orang 1 tahun	49.000.000	5 orang 1 tahun	49.000.000	5 orang 1 tahun	49.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	448.700.000	100	448.700.000	100	448.700.000	100	448.700.000	100	448.700.000	100	448.700.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	448.700.000	100	448.700.000	100	448.700.000	100	448.700.000	100	448.700.000	100	448.700.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah akses sarana dan prasarana yang dibangun	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000	3 titik	200.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	meningkatkan kualitas masyarakat tingkat kelurahan	248.700.000	1 keg	248.700.000	1 keg	248.700.000	1 keg	248.700.000	1 keg	248.700.000	1 keg	248.700.000		
JINGLL	ONG				467.472.200		469.972.200		472.972.200		472.972.200		474.072.200		474.072.200		474.072.200
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	69.972.200	100	72.472.200	100	75.472.200	100	75.472.200	100	76.572.200	100	76.572.200		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	11.400.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.400.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penerima seragam Dinas	2.500.000	7 orang	2.500.000	7 orang	2.500.000	7 orang	2.500.000	7 orang	2.500.000	7 orang	2.500.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	45.102.200	100	47.602.200	100	47.602.200	100	47.602.200	100	48.102.200	100	48.102.200		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makin Harian, Makmin Tamu, Makmin Rapat dan Pembelian ATK	34.695.000	1 tahun	34.695.000	1 tahun	34.695.000	1 tahun	34.695.000	1 tahun	34.695.000	1 tahun	34.695.000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Belanja Cetakan dan Penggandaan	1.407.200	1 tahun	1.407.200	1 tahun	1.407.200	1 tahun	1.407.200	1 tahun	1.407.200	1 tahun	1.407.200		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah	7.000.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	9.500.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	10.970.000	100	10.970.000	100	10.970.000	100	10.970.000	100	10.970.000	100	10.970.000	100	10.970.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian materai dan cek giro	1.970.000	197 buah	1.970.000	197 buah	1.970.000	197 buah	1.970.000	197 buah	1.970.000	197 buah	1.970.000	197 buah	1.970.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Nota Pembelian Speedy dan tagihan Listrik	9.000.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	9.000.000	1 tahun	9.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000	100	25.900.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan Kantor	25.900.000	3 orang	25.900.000	3 orang	25.900.000	3 orang	25.900.000	3 orang	25.900.000	3 orang	25.900.000	3 orang	25.900.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000	100	371.600.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan sarana dan prasarana yang dibangunlah	228.000.000	1 keg	228.000.000	1 keg	228.000.000	1 keg	228.000.000	1 keg	228.000.000	1 keg	228.000.000	1 keg	228.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pada Kelurahan Posyandu, PKK	143.600.000	1 keg	143.600.000	1 keg	143.600.000	1 keg	143.600.000	1 keg	143.600.000	1 keg	143.600.000	1 keg	143.600.000		
BEDUR I					544.570.000		545.570.000		548.570.000		548.570.000		549.670.000		549.670.000		549.670.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	183.770.000	100	184.770.000	100	187.770.000	100	187.770.000	100	188.870.000	100	188.870.000	100	188.870.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Administrasi Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	11.400.000	100	11.400.000	100	14.400.000	100	14.400.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	11.400.000	4 orang	11.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	14.400.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000	4 orang	15.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	4.450.000	100	4.450.000	100	4.450.000	100	4.450.000	100	4.450.000	100	4.450.000	100	4.450.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penerima pakaian dinas beserta atributnya	4.450.000	9 orang	4.450.000	9 orang	4.450.000	9 orang	4.450.000	9 orang	4.450.000	9 orang	4.450.000	9 orang	4.450.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	96.575.000	100	97.575.000	100	97.575.000	100	97.575.000	100	98.075.000	100	98.075.000	100	98.075.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	47.000.000	1 unit	47.000.000	1 unit	47.000.000	1 unit	47.000.000	1 unit	47.000.000	1 unit	47.000.000	1 unit	47.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah atk yang tersedia jumlah penerima belanja makanan dan minuman harian	39.075.000	1 paket 10 orang	39.075.000	1 paket 10 orang	39.075.000	1 paket 10 orang	39.075.000	1 paket 10 orang	39.075.000	1 paket 10 orang	39.075.000	1 paket 10 orang	39.075.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2.000.000	9000 lbr	2.000.000	9000 lbr	2.000.000	9000 lbr	2.000.000	9000 lbr	2.000.000	9000 lbr	2.000.000	9000 lbr	2.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	8.500.000	1 kali	9.500.000	1 kali	9.500.000	1 kali	9.500.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	21.345.000	100	21.345.000	100	21.345.000	100	21.345.000	100	21.345.000	100	21.345.000	100	21.345.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000	300 surat	2.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan listrik dan telepon speedy	17.345.000	12 bln	17.345.000	12 bln	17.345.000	12 bln	17.345.000	12 bln	17.345.000	12 bln	17.345.000	12 bln	17.345.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	2.000.000	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000	2 unit	2.000.000		



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase (%) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	50.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000	100	31.500.000		
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah penerima jasa kebersihan, IT, Teknis Kegiatan	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000	3 orang	31.500.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000	100	329.300.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	184.325.000	100%	184.325.000	100%	184.325.000	100%	184.325.000	100%	184.325.000	100%	184.325.000	100%	184.325.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Jumlah koordinasi dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat	144.975.000	6 keg	144.975.000	6 keg	144.975.000	6 keg	144.975.000	6 keg	144.975.000	6 keg	144.975.000	6 keg	144.975.000		
					21.765.171.772,00	-	22.279.884.996,89	-	22.679.380.143,59	-	22.761.948.043,57	-	22.943.054.475,51	-	23.028.454.466,80	-	23.028.454.466,80		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Ponorogo kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Ponorogo itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Ponorogo. Dengan demikian Kantor Kecamatan Ponorogo memiliki kontribusi terhadap banyak misi, hal



ini karena tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Ponorogo adalah bidang pelayanan. Adapun indikator kinerja Kecamatan Ponorogo untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Tabel 7.1 berikut ini :



Tabel 7.1
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	80	85	86	86	87	87	87



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Ponorogo untuk lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, maupun Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kecamatan Ponorogo beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dalam perencanaan, Renstra digunakan sebagai landasan penyusunan Renja dan RKA Kecamatan Ponorogo. Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Ponorogo. Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Ponorogo, 23 September 2021

CAMAT PONOROGO



SISWOYO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19650712 198903 1 015